



JNFC 1 (1) (2016)

Journal of Nonformal Education and Community Empowerment

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>



KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMLOKO KABUPATEN GROBOGAN

TRI 'ULYA QODRIYATI✉ & FAKHRUDDIN
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Mei 2016

Disetujui Mei 2016

Dipublikasikan Juni 2016

Keywords:

Community

Empowerment; Women's Savings and Loans; PNPM MPd.

Abstrak

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) pada tahun 2015, bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan indikator peningkatan pemberdayaan ekonomi anggota SPP di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek penelitian 6 pemanfaat SPP, kader pemberdaya masyarakat dan desa pemberdayaan (KPMDP) sekaligus ketua SPP, ketua tim pelaksana kegiatan (TPK), ketua unit pengelola kegiatan (UPK) dan Kepala Desa Kemloko. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data dan metode. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan SPP sejak tahun 2014 hingga 2015 tetap berjalan sebagai keberlanjutan aset PNPM Mandiri Perdesaan. Bentuk kegiatan SPP berupa peminjaman, melakukan usaha, pengembalian dan pengembangan. Kemandirian ekonomi masyarakat meliputi indikator pendapatan, kepemilikan dan biaya pendidikan.

Abstract

The results of this study aims to describe the types of activities of the National Program, Rural Community Empowerment (PNPM-MPD) in 2015, forms the SPP activity and an indicator of increased economic empowerment of members of the women's credit (SPP) in the Village District of Godong Kemloko Grobogan. This study used a descriptive qualitative approach, techniques of data collection is done by means of interviews, observation and documentation. The subjects of the study 6 beneficiaries SPP, cadre of community empowerment and rural empowerment (KPMDP) and chairman of the SPP, chairman of the implementation team (TPK), chairman of the management unit of activity (UPK) and Village Heads Kemloko. The validity of the data used is triangulation of data and methods. The data analysis technique is descriptive qualitative phase of data collection, data reduction, presentation and conclusion. The results of this study show 2014 Village Kemloko only get funds from PNPM Rural SPP 2015 SPP continues to run as an asset sustainability PNPM Mandiri. Form of tuition in the form of lending activities, conduct business, returns and development. Community economic independence include indicators of income, ownership and education costs.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung A2 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: agnes@unnes.ac.id

ISSN 2252-6331

PENDAHULUAN

Angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2013 mencapai 29,07 juta jiwa atau 11,37% dari total penduduk Indonesia, jumlah pengangguran di Indonesia tinggi mencapai 7,4 juta jiwa atau 6,25% dari total angka kerja (BPS, Agustus 2013). Oleh karena itu kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu program pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja ditingkat perdesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (Purnomo, 2013: 1).

Visi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengaktifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM-MPd, strategi yang dikembangkan PNPM-MPd yaitu menjadikan masyarakat

miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM-MPd lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM-MPd diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Desa Kemloko adalah desa yang terletak di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sebagian besar penduduknya adalah bekerja sebagai petani. Pada bulan Juni 2014, total jumlah penduduk sebanyak 4.909 Jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 2.461 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.448 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 1.558 KK. Dengan batas wilayah sebelah utara Desa Godong, sebelah selatan Desa Angaswangi, sebelah barat Desa Dorolegi, dan sebelah timur Desa Sumberagung dengan luas wilayah 498,111 Ha (data kelurahan).

Jenis kegiatan PNPM berupa SPP (Simpan Pinjam Perempuan) juga sangat beragam. Menurut Bendahara dan KPMD Pemberdayaan (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), dengan adanya SPP ini dapat membantu sekali masyarakat yang mempunyai usaha kecil seperti halnya berdagang kecil-kecilan. Banyak masyarakat yang memanfaatkan SPP karena bunga pinjaman lebih kecil dibanding jasa rentenir. Pada tahun 2014 ini bunga pengembalian SPP menurun menjadi 1,4%. Dampaknya banyak masyarakat yang semula pinjam ke rentenir sekarang beralih ke SPP karena pengembalian bunga yang jauh lebih kecil dibandingkan ke rentenir.

Kenyataan di lapangan, masyarakat Desa Kemloko dalam pengembalian uang SPP banyak yang tepat waktu, banyak juga yang molor, dan terkadang ada anggota yang menggelapkan uang tersebut. Pengembalian uang molor dikarenakan uang belum terkumpul yang disebabkan oleh usaha dagangan sepi dan akhirnya tidak bisa mengembalikan uang SPP tepat waktu. Selain itu

kurangnya tanggung jawab peminjam saat pengembalian pinjaman, sehingga kegiatan SPP menjadi macet. Oleh karena itu Bendahara dan KPMD harus melengkapi uang SPP dan disetorkan ke UPK Kecamatan setiap bulannya.

METODE

Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data dan metode. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Subyek dalam penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri dari 6 pemanfaat SPP, 1 kader pemberdaya masyarakat dan desa pemberdayaan (KPMDP) sekaligus ketua SPP, 1 ketua tim pelaksana kegiatan (TPK), 1 ketua unit pengelola kegiatan (UPK) dan Kepala Desa Kemloko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

SPP (Simpan Pinjam Perempuan) merupakan bantuan nonfisik dari PNPM Mandiri Perdesaan untuk masyarakat perempuan. Agar masyarakat mengetahui SPP, maka dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Selain sosialisasi, penyaluran dana dan pencairan dana SPP juga perlu diteliti. Terdapat 2 kelompok aktif SPP, yang terdiri dari PKK 1 Plosorejo dan PKK 2 Plosorejo.

Sumber dana SPP berasal dari 25% dari BLM, sumber (dana 95% dari APBN) dan (5% dari APBD). Dana yang digulirkan oleh UPK untuk SPP pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebesar Rp 52.000.000,00 dari Rp 5.049.000.000,00.

Dalam menyerahkan dana SPP langsung ke kelompok peminjam, satu per satu anggota di dokumentasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sedangkan penyaluran dana dari UPK ke pemanfaat SPP berupa

uang cash. Pada waktu tim pendanaan memutuskan nominalnya, UPK menyerahkan langsung ke kelompok yang meminjam. Satu persatu di dokumentasi untuk menghindari penyalahgunaan atau penyimpangan. Penyaluran dana SPP dilakukan oleh UPK ke ketua kelompok SPP, disaksikan TPK dan KPMD. Dalam penyaluran dana SPP, calon pemanfaat SPP mengajukan pinjaman modal usaha. Jika sebelumnya angsuran lancar, maka pinjaman pada periode berikutnya diperbolehkan dengan menaikkan angka pinjaman. Dalam kegiatan SPP, sasaran ditujukan ke Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif untuk penambahan permodalan agar masyarakat mampu mengembangkan usahanya. Dalam penentuan sasaran SPP, ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Kemloko pada tahun 2014 yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Hasil temuan terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program nasional pemberdayaan masyarakat dari pemerintah, khususnya SPP pada tahun 2015 masih berlangsung sebagai aset dari PNPM Mandiri Perdesaan. Jenis kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Kemloko tahun 2014 berupa simpan pinjam untuk mendapatkan permodalan, peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif dengan menyediakan pendanaan, kegiatan peningkatan kapasitas usaha kelompok perempuan

Sosialisasi kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sepanjang pelaksanaan program ke berbagai pihak agar terbangun pemahaman, kepedulian serta dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil temuan terkait sosialisasi dilaksanakan melalui musyawarah antar desa (MAD) yang kemudian dilanjutkan ke musyawarah desa (MD), selanjutnya sosialisasi terus disampaikan ke kelompok masyarakat seperti PKK, Yasinan, Arisan RT, Arisan RW yang sudah menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam selama kurang lebih satu tahun.

Dana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK.

Dana tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan, salah satunya yaitu SPP.

UPK menjalankan kegiatan simpan pinjam pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) layaknya lembaga keuangan, dengan menjalankan salah satu peran yaitu memberikan kredit pada masyarakat. Kredit diberikan kepada kelompok-kelompok dengan sistem "tanggung renteng". Kegiatan SPP ditujukan kepada ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai usaha dan mengajukan pinjaman modal ke SPP guna mengembangkan usahanya. Untuk Desa Kemloko mendapatkan dana Rp 52.000.000,00 dari Rp 5.049.000.000,00.

Penyaluran dana SPP memerlukan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu proposal masuk ke UPK, yang kemudian diseleksi kelayakan dan kelengkapan oleh UPK, dan dibahas bersama Tim Verifikasi untuk dilanjutkan kunjungan ke masing-masing kelompok guna dinilai kelayakan dan kemampuan calon peminjam, kemudian dibahas bersama Tim Pendanaan untuk diberikan nominal besarnya pinjaman masing-masing kelompok, dan dicairkan ke kelompok sesuai kondisi keadaan keuangan UPK. Dana SPP berupa uang cash dan UPK memberikan langsung ke ketua kelompok SPP, disaksikan TPK dan KPMD.

Sasaran dari program simpan pinjam ini adalah masyarakat pedesaan agar dapat melakukan aktifitas perekonomian yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir dalam PTO 2014 adalah (a) Kelompok Simpan Pinjam (KSP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM, (b) Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM, dan (c) Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin

yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

Bentuk Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

Hasil temuan terkait bentuk kegiatan SPP dalam penilitan ini ditunjukkan dengan masyarakat memanfaatkan dana SPP berupa peminjaman, melakukan usaha, pengembalian dan pengembangan. Sebelum melakukan pinjaman, masyarakat bermusyawarah terlebih dahulu. Bentuk musyawarah yang dilakukan dalam penentuan pinjaman SPP yaitu pemanfaat SPP dikumpulkan, kemudian dimusyawarahkan bersama TPK dan KPMD.

Dalam penentuan pinjaman dana SPP dilakukan secara bottom up. Karena dari masyarakat sebagai pemanfaat SPP mengajukan berapa jumlah nominal yang akan dipinjam dan disesuaikan dengan kemampuan anggota atau pemanfaat SPP ketika mengembalikan uang SPP yang diangsurnya setiap bulan. Dalam penentuan boleh atau tidaknya melakukan pinjaman dana SPP yaitu KPMD-P dan TPK. Karena mereka mengetahui kondisi di lapangan. Besar pinjaman yang boleh dipinjam 1-5 juta.

Masyarakat dalam memanfaatkan dana SPP sesuai dengan usulan masyarakat. Jenis usaha dari anggota atau pemanfaat SPP semuanya individu. Bentuk usaha pemanfaat SPP beraneka ragam. Dari membuka warung rumahan, berjualan puli pecel keliling, ternak burung puyuh yang diambil telurnya, penjual donat yang dititipkan ke warung-warung, pedagang beras dan pala-wija.

Sebagai anggota SPP, pemanfaat mampu mengembangkan usahanya karena adanya penambahan modal usaha. Perkembangan usaha anggota atau pemanfaat SPP dikarenakan adanya pinjaman modal usaha. Selain berkembang, ada juga pemanfaat SPP yang mengalami penurunan.

Hasil temuan terkait dalam pengembalian dana SPP, masyarakat ada yang sudah tepat waktu saat pengembalian dana SPP dan ada juga yang belum. Ketepatan waktunya disesuaikan dengan jadwal pencairan. Jadwal pengembalian ditetapkan ketika uang SPP dicairkan ke masyarakat. Misal masya-

rakat mendapatkan cairan modal usaha dari SPP pada tanggal 14, maka pengembalian dana SPP paling lambat tanggal 14 pula.

Tingkat kelancaran dalam pengembalian dana SPP terbilang sedang. Karena ada pula pemanfaat tidak mengembalikan tepat waktu. Dengan permasalahan seperti itu, maka KPMD atau Ketua Kelompok mengambil langkah dengan mengeluarkan dari kelompok dan periode berikutnya tidak diberikan pinjaman. Hal tersebut dikarenakan banyaknya anggota dan tingkat tanggung jawabnya berbeda.

Hasil temuan terkait pelaksanaan usaha kelompok SPP di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan berbeda-beda, tergantung individu melakukan usaha. Pengembangannya, dengan cara penambahan modal untuk menambah barang dagangan maupun pengembangan usaha yang dimiliki seperti halnya warung, penjual makanan keliling, dan lainnya. Usaha masyarakat ada yang berkembang, menetap dan ada juga yang bangkrut. Namun bisa dikatakan usaha masyarakat mengalami peningkatan. Dengan adanya SPP, usaha masyarakat berkembang ada yang mandiri, ketergantungan, dan lainnya. Modal usaha masyarakat ada yang menggunakan dana sendiri, patungan dengan suami. Pengembangan usaha masyarakat berupa pengembangan modal, barang dan sejenisnya.

Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan berupa SPP dilakukan dengan bentuk musyawarah. Musyawarah dilakukan diawal secara kelompok untuk menentukan besaran pinjaman dengan pinjaman antara 1 sampai 5 juta dan kemudian diajukan pemanfaat melalui proposal (bottom up).

Meskipun bottom up, tetap ada aturan lokal yang mengikat disepakati ketika MAD. Besar pinjaman yang boleh dipinjam sesuai kebutuhan yang diajukan. Tetapi aturan lokal maksimal Rp 5.000.000,00 setiap orang. Melalui forum MAD disepakati bahwa semua masyarakat boleh pinjam kecuali PNS atau yang tercatat sebagai pegawai sipil.

Dalam penelitian (Widayati, 2013: 72) program pemerintah yang bersifat top down tersebut telah dikoreksi (setidak-tidaknya didampingi) oleh program yang berasal dari

masyarakat yang bersifat bottom up. PNMP mengakomodir aspirasi-aspirasi masyarakat bawah, memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, dan melakukan evaluasi. Melalui salah satu program kerja PNPM adalah penyediaan dana bergulir, masyarakat dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha yang telah dimiliki. Dana bergulir tersebut dipergunakan untuk pembiayaan masyarakat yang memiliki usaha-usaha ekonomi produktif (UEP) di mana pelakunya masyarakat umum, dan pembiayaan untuk khusus kaum perempuan yang memiliki usaha yang disebut Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (kelompok SPP).

(Kementerian PPN/Bappenas, 2012: 2) menyatakan proses perencanaan tersebut dilakukan dengan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) dan difasilitasi oleh tenaga ahli sosial dan teknik. Para tenaga ahli ini membantu membina masyarakat dalam kegiatannya, namun tidak mengontrol penggunaan dana.

Pemanfaatan dana SPP oleh pemanfaat digunakan untuk melakukan usaha. Bentuk usaha masyarakat ada pedagang puli pecel keliling, pembuat donat yang dalam penjualannya dititipkan ke warung-warung, pedagang sembako, dan juga pedagang beras atau palawija.

Kemampuan pengembalian dana SPP oleh pemanfaat mayoritas dapat mengembalikan dengan tepat waktu beserta bunga pengembalian. Presentase bunga pengembalian yang harus masyarakat bayarkan yaitu 2% dengan rincian 1,4% disetorkan ke UPK, 0,2% untuk operasional dan 0,4 untuk tabungan. Namun ada juga sebagian anggota atau pemanfaat SPP tidak mampu membayarkannya dengan tepat waktu. Dalam pengembalian dana SPP jika tidak lancar, Ketua SPP melaporkan ke UPK untuk ditangani permasalahannya.

Kelompok SPP yang lancar dalam mengembalikan dana SPP, maka akan diberikan reward dari UPK. Reward tersebut berupa stimulan yaitu IPTW (Indeks Pengembalian Tepat Waktu) berupa uang 10% dari jasa di akhir pelunasan.

Dalam penelitian (Widayati, 2013: 66)

menyatakan dalam rangka memotivasi ke-disiplinan para peminjam untuk melunasi-hutang diterapkan sistem pemberian reward berupa Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebaliknya bila ada anggota kelompok yang tidak lancarmengangsur pinjaman, diberlakukan sanksi tanggung renteng. Pengembangan usaha kelompok di Desa Kemloko untuk SPP 1 dan 2 dikelola secara individu. Kelompok PKK 1 terdiri dari 10 orang anggota, dan Kelompok PKK 2 terdiri dari 6 orang anggota.

Dalam penelitian (Widayati, 2013: 65), perguliran dana diberikan kepada kelompok-kelompok yang ada di desayang bersangkutan, dalam arti individu masyarakat yang belum tergabung dalam kelompok tidak dapat memanfaatkan dana bergulir. Satu kelompok minimal terdiri dari 4 orang dan maksimal 10 orang.

Modal usaha masyarakat ada yang menggunakan dana sendiri dan patungan dengan suami. Jenis pengembangan usaha berupa pengembangan modal. Dengan pengembangan modal, maka modal usaha anggota bertambah sehingga mampu mengembangkan usahanya dengan menambah ragam barang atau jenis yang dijual. Mayoritas usaha anggota SPP mengalami perkembangan, sehingga hasilnya meningkat. Dan ada juga sepi atau tetap dikarenakan musiman, karena mata pencaharian penduduk mayoritas sebagai petani. Jadi musim panen dan paceklik juga mempengaruhi minat konsumen.

Indikator Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Anggota SPP

Hasil temuan terkait indikator peningkatan pemberdayaan ekonomi anggota SPP meliputi pendapatan, kepemilikan dan biaya pendidikan. Adanya kegiatan SPP, pendapatan ekonomi masyarakat mengalami perubahan dari turun menjadi naik, atau bisa juga sebaliknya. Karena anggota memanfaatkan dana SPP dengan baik dan benar-benar digunakan untuk usaha dari berdagang palawija, sembako, warungan, makanan keliling dan juga makanan produksi rumahan sehingga SPP memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat.

Dari berbagai usaha masyarakat, semua pemanfaat SPP mengalami peningkatan pendapatan. Mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani dan musim panen mempengaruhi tingkat beli masyarakat menjadi meningkat. Sebaliknya jika musim paceklik, tingkat beli masyarakat menjadi turun dan pedagang mengalami penurunan pendapatan.

Namun jika ditarik kesimpulan dari anggota yang memanfaatkan dana SPP mengalami peningkatan pendapatan. Walaupun terkadang mengalami penurunan pendapatan, tetap dan meningkat, pemanfaat SPP mengaku pendapatan lebih meningkat semenjak menjadi anggota dan pemanfaat SPP.

Peningkatan pendapatan masyarakat memang menjadi tujuan utama dalam pemberdayaan. Selain adanya kemandirian usaha dalam hasil penyelenggaraan pemberdayaan, peningkatan penghasilan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekunder dan tersier.

Dari semua pemanfaat SPP sudah mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Seperti televisi, kulkas, sepeda motor, perhiasan dan juga mobil. Kebutuhan sekunder dan tersier masyarakat di dapat dari usaha modal tambahan SPP, dan ada juga karena tambahan dari suami.

Begitu pula dengan biaya pendidikan, baik pendidikan langsung maupun tak langsung, masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Sehingga anak-anak menyenangi bangku sekolah untuk masa depan anak dan kebahagiaan orang tua.

Hasil temuan terkait dengan peningkatan kemandirian kewirausahaan masyarakat pada kelompok SPP 1 dan 2 di Desa Kemloko yaitu adanya peningkatan pendapatan, peningkatan kepemilikan dan biaya pendidikan.

Pendapatan masyarakat fluktuatif. Terkadang tetap, turun dan meningkat. Mayoritas penduduk Desa Kemloko bermatapencaharian sebagai petani, sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli atau sebagai konsumen. Jika musim panen, maka pendapatan pemanfaat SPP mengalami peningkatan. Karena jika musim panen,

tingkat keinginan untuk membeli barang sangat meningkat. Selain itu musim lebaran, juga mempengaruhi tingkat beli masyarakat. Selain itu pendapatan masyarakat mengalami tetap dan menurun, dikarenakan rendahnya minat beli masyarakat.

Sedangkan indikator kepemilikan, pemanfaat SPP mampu menambah barang dagangan, sehingga barang yang dijual masyarakat mengalami peningkatan. Peningkatan kepemilikan dalam penelitian ini ada kebutuhan sekunder dan tersier). Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah kebutuhan akan radio, TV, atau sepeda motor bagi masyarakat yang pendapatannya masih tergolong rendah. Kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah adalah kebutuhan yang biasanya dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dipenuhi. Contoh kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan mobil, alat rumah tangga mewah, dan perhiasan mahal, (<https://rizkacil.wordpress.com/2012/06/03/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier/>).

Mayoritas kebutuhan sekunder dapat terpenuhi. Ada juga pemenuhan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi sebelum memanfaatkan SPP. Namun untuk kebutuhan tersier, ada juga pemanfaat yang dapat memenuhi karena adanya tambahan dari suami.

Pemanfaat SPP mampu memenuhi biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa dukungan biaya, proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan lancar. Budiman (2011), menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008, pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat".

Budiman (2011), biaya satuan pendidikan dapat dibedakan antara biaya langsung (direct costs) dan biaya pendidikan tidak langsung (indirect costs). Biaya langsung (direct costs) adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan input yang langsung terkait dengan proses belajar mengajar. Biaya satuan pendidikan langsung ini mencakup pengeluaran-pengeluaran, antara lain untuk

gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya; pembelian bahan, peralatandan perlengkapan belajar; dan pembangunan gedung untuk belajar. Biaya tidak langsung (indirect costs) adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan proses belajarmengajar tetapi menunjang proses belajar mengajar tersebut. Biaya tidak langsung ini, antara lain adalah biaya overhead universitas, fakultas, lembaga, pemerintah pusat, dan pendapatan yang tidak jadi diterima oleh mahasiswa karena kuliah dan tidak bekerja (forgone earning). Dalam penelitian ini semua pemanfaat SPP mampu memenuhi biaya pendidikan langsung dan tak langsung untuk anaknya. Karena mayoritas penduduk Desa Kemloko sadar akan pentingnya pendidikan untuk anaknya.

SIMPULAN

Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan meliputi jenis kegiatan sarana prasarana berupa talud jalan, jalan rabat beton, pendidikan berupa gedung TK, PKH (Peningkatan Kapasitas Hidup) dan SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Tahun 2014 Desa Kemloko hanya mendapatkan dana SPP dari PNPM Mandiri Perdesaan hingga 2015 ini SPP tetap berjalan sebagai keberlanjutan aset PNPM Mandiri Perdesaan.

Bentuk kegiatan SPP di Desa Kemloko, mencakup anggota atau pemanfaat SPP melakukan pinjaman. Melakukan usaha dengan memanfaatkan dana SPP sebagai penambahan permodalan bentuk usaha anggota atau pemanfaat SPP sehingga mampu berkembang. Anggota atau pemanfaat SPP melakukan pengembalian dana SPP, walaupun ada anggota SPP yang tidak tepat dan tidak akan menerima lagi dana pinjaman SPP pada PNPM Mandiri Perdesaan. Anggota atau pemanfaat SPP mampu melakukan pengembangan pada bentuk usahanya.

Indikator pemberdayaan terkait kemampuan ekonomi di Desa Kemloko, meliputi indikator pendapatan anggota atau pemanfaat SPP mengalami perkembangan dan meningkat. Indikator kepemilikan anggota atau pemanfaat SPP mengalami peningka-

tan, baik kebutuhan sekunder maupun tersier. Biaya pendidikan langsung dan tak langsung, semua anggota atau pemanfaat SPP mampu mencukupinya karena masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan untuk anaknya.

SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sebagai PNPM Mandiri Perdesaan di tahun 2015 ini merupakan keberlanjutan dari aset PNPM Mandiri Perdesaan yang harus dilanjutkan. Walaupun PNPM sudah selesai programnya, dana di Kecamatan harus tetap dikembangkan dengan usaha-usaha nyata dan tetap dirasakan oleh pengelola dan pemanfaat SPP. Bentuk kegiatan SPP pada masyarakat perlu ditingkatkan sosialisasi dalam pinjaman dana SPP, pelatihan bentuk usaha yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadikan usaha masyarakat berkembang dan mandiri, sehingga mampu mengembalikan dana SPP secara tepat dan dapat mengembangkan usaha masyarakat. Peningkatan pendapatan, kepemilikan dan biaya pendidikan anak melalui pemberdayaan masyarakat maka akan dapat meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, kemandirian kewirausahaan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Ahmad R. 2011. Analisis Satuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Negeri Malang. Skripsi. Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Genius. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Mp) Di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2011
- Purnomo, Agung T. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Semarang.
- Rizka. 2012. Kebutuhan primer sekunder dan tersier. <https://rizkacil.wordpress.com/2012/06/03/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier/> [diunduh Rabu, 25 Februari 2015, pada 02.50 WIB].
- Widayati, S. 2013. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Dana Bergulir PNPM Mandiri Bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Sraten Kabupaten Semarang Jurnal Ilmiah Inkoma, Volume 24, Nomor 1, Februari 2013.
- . 2012. Kajian Tata Kelola PNPM Perdesaan: Analisa di Tingkat Masyarakat (Mei 2012), Kementerian PPN/ Bappenas.
- . 2013. PNPM Mandiri Paket Informasi 2012 – 2013, Jakarta.
- . 2014. PNPM Mandiri Information Kit 2014, Jakarta: Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri Management Working Group.